



**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD) TAHUN 2025**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah S.A.W, atas Limpahan Rakhmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Rencana Kerja (**PERUBAHAN RENJA**) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPPKA, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya rencana kerja (PERUBAHAN RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Sangatta, Agustus 2025
Kepala Dinas,



Nora Ramadani, S.H., M.H
NIP. 19720330 200502 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar -----i

Daftar Isi -----ii

BAB I PENDAHULUAN ----- 4

1.1 Latar Belakang ----- 4

1.2 Landasan Hukum ----- 7

1.3 Maksud dan Tujuan -----10

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN
LALU -----12**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD -----12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD-----24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD-----27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN -----29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional -----29

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD -----34

3.3 Program dan Kegiatan -----35

BAB IV PENUTUP -----46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja- SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka rencana kerja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan

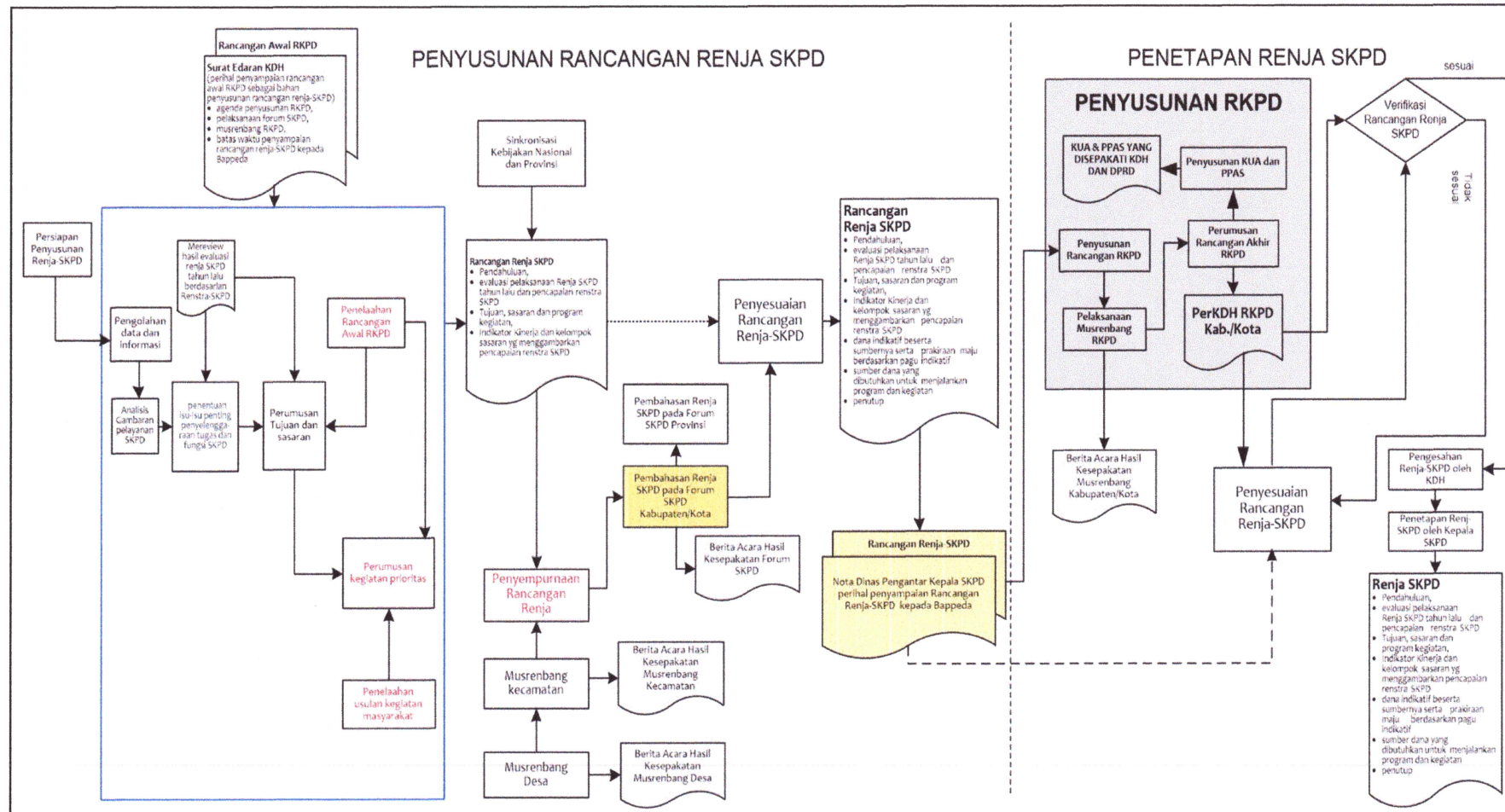
Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Gambar I.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 adalah: i) RPJPD Kabupaten Kutai Timur (2006-2025); ii) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya; iii) RPJMN (2020-2024); iv) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023); dan v) RKPD Provinsi Kalimantan Timur (2022). Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 merupakan: i) referensi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) dan/atau lintas PD Tahun 2022; ii) dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 guna menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (perubahan renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ini antara lain :

A. Undang - Undang

1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
3. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
4. Undang – undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal;

5. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025;
6. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Undang – undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian.

B. Peraturan Pemerintah

1. Permenpan nomor 9 tahun 2007 tentang pedoman umum penerapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan terkait perencanaan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
7. Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional.

8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
11. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
12. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
14. Peraturan presiden R.I. nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden R.I No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, terakhir perubahan dengan peraturan presiden R.I. Nomor 59 tahun 2007;
15. Peraturan presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
16. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri;
17. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri;

C. Peraturan daerah, edaran bupati dan surat keputusan kepala SKPD

1. Peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 15 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang provinsi Kalimantan timur 2015 – 2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2013 – 2018;
3. Peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 4 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Kalimantan timur 2009 – 2013;
4. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 2 tahun 2004 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah;
5. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 – 2025 (lembaran daerah tahun 2010 Nomor 4);
6. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 471/050/B.1/04/2016 Tahun 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Tahun 2025.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Perubahan Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur menerima anggaran sebesar Rp. 67.785.806.417,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program 18 kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 63.823.638.253,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,15 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 94.15 %. Perhatikan tabel berikut :

PROGRES KEUANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur s/d per 31 Desember Tahun 2023

Kode						Program/Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran	Bobot %	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)				Sumber Dana	Permasalahan	Tindak Lanjut yg diharapkan	Ket
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Rp 765,530,370.00		Rp 753,799,592.00	11,730,778.00								
	3	30	02	2	06	- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat Kabupaten / Kota		Rp 465,530,370.00		461,025,334.00	4,505,036.00								
	3	30	02	2	06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Rp 40,000,000.00	0.06	39,901,026.00	98,974.00	99.75		99.75		APBD			
	3	30	02	2	06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp 425,530,370.00	0.63	421,124,308.00	4,406,062.00	98.96		98.96		APBD			
						- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Rp 300,000,000.00		292,774,258.00	7,225,742.00								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp 300,000,000.00	0.44	292,774,258.00	7,225,742.00	97.59		97.59		APBD				
2	3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp 13,250,000,000.00		12,517,558,017.00	732,441,983.00								
	3	30	03	2	01	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp 13,250,000,000.00		12,517,558,017.00	732,441,983.00								
	3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 13,250,000,000.00	19.55	12,517,558,017.00	732,441,983.00	94.47		95.77		APBD			
3	3	30	04	2		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Rp 7,690,000,000.00		7,566,159,201.00	123,840,799.00								
	3	30	04	2	02	- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		Rp 7,690,000,000.00		7,566,159,201.00	123,840,799.00								
	3	30	04	2	01	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barangdalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Rp 360,000,000.00	0.53	242,626,498.00	117,373,502.00	67.40		67.40		APBD			
	3	30	04	2	01	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Rp 7,330,000,000.00	10.81	7,323,532,703.00	6,467,297.00	99.91		99.91		APBD			
4	3	30	05	2		Program Pengembangan Ekspor		Rp 4,482,337,933.00		3,992,322,720.00	490,015,213.00								
	3	30	05	2	01	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota		Rp 4,482,337,933.00		3,992,322,720.00	490,015,213.00								
	3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Rp 600,000,000.00	0.89	593,409,735.00	6,590,265.00	98.90		98.90		APBD			
	3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	Rp 600,000,000.00	0.89	597,545,354.00	2,454,646.00	99.59		99.59		APBD			
	3	30	05	2	01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Rp 3,282,337,933.00	4.84	2,801,367,631.00	480,970,302.00	85.35		85.35		APBD			
5	3	30				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Rp 1,860,000,000.00		1,597,892,888.00	262,107,112.00								
	3	30	06	2	01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Rp 1,860,000,000.00		1,597,892,888.00	262,107,112.00								
	3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 1,460,000,000.00	2.15	1,274,978,728.00	185,021,272.00	87.33		87.33		APBD			
	3	30	06	2	01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 400,000,000.00	0.59	322,914,160.00	77,085,840.00	80.73		80.73		APBD			
6	3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Rp 25,528,943,603.00		Rp 23,793,916,616.00	1,735,026,987.00								
	3	31	01	2	01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 540,000,000.00		521,312,742.00	18,687,258.00								
	3	31	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 390,000,000.00	0.58	375,455,911.00	14,544,089.00	96.27		96.27		APBD			
	3	31	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 150,000,000.00	0.22	145,856,831.00	4,143,169.00	97.24		97.24		APBD			

3	31	01	2	02		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	15,885,179,667.00		14,229,531,843.00	1,655,647,824.00							
3	31	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	11,596,053,521.00	17.11	10,291,038,520.00	1,305,015,001.00	88.75		88.75		APBD		
3	31	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	3,134,926,146.00	4.62	2,856,232,283.00	278,693,863.00	91.11		91.11		APBD		
3	31	01	2	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Rp	447,861,866.00	0.66	409,714,044.00	38,147,822.00	91.48		91.48		APBD		
3	31	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	706,338,134.00	1.04	672,546,996.00	33,791,138.00	95.22		95.22		APBD		
3	31	01	2	03		-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	45,000,000.00		45,000,000.00	-							
3	31	01	2	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	45,000,000.00	0.07	45,000,000.00	-	100.00		100.00		APBD		
3	31	01	2	05		-	Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Rp	2,566,289,679.00		2,565,606,299.00	683,380.00							
3	31	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	889,532,662.00	1.31	889,307,662.00	225,000.00	99.97		99.97		APBD		
3	31	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp	1,676,757,017.00	2.47	1,676,298,637.00	458,380.00	99.97		99.97		APBD		
3	31	01	2	06		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,324,550,046.00		1,324,032,961.00	517,085.00							
3	31	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	29,965,736.00	0.04	29,965,469.00	267.00	100.00		100.00		APBD		
3	31	01	2	06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	62,000,000.00	0.09	61,941,337.00	58,663.00	99.91		99.91		APBD		
3	31	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1,142,584,310.00	1.69	1,142,211,006.00	373,304.00	99.97		99.97		APBD		
3	31	01	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	90,000,000.00	0.13	89,915,149.00	84,851.00	99.91		99.91		APBD		
3	31	01	2	07		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp	1,137,080,000.00		1,133,019,489.00	4,060,511.00							
3	31	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	1,037,080,000.00	1.53	1,033,848,415.00	3,231,585.00	99.69		99.69		APBD		
3	31	01	2	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rp	100,000,000.00	0.15	99,171,074.00	828,926.00	99.17		99.17		APBD		
3	31	01	2	08		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	637,938,521.00		621,656,521.00	16,282,000.00							
3	31	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	37,018,200.00	0.05	32,861,200.00	4,157,000.00	88.77		88.77		APBD		
3	31	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	600,920,321.00	0.89	588,795,321.00	12,125,000.00	97.98		97.98		APBD		
3	31	01	2	09		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	3,392,905,690.00		3,353,756,761.00	39,148,929.00							
3	31	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	1,200,000,000.00	1.77	1,193,648,780.00	6,351,220.00	99.47		99.47		APBD		
3	31	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	650,000,000.00	0.96	648,800,000.00	1,200,000.00	99.82		99.82		APBD		
3	31	01	2	09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	1,342,906,390.00	1.98	1,311,420,761.00	31,485,629.00	97.66		97.66		APBD		
3	31	01	2	09	11		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	199,999,300.00	0.30	199,887,220.00	112,080.00	99.94		99.94		APBD		
7	3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	2,948,195,984.00		2,899,362,426.00	48,833,558.00							
3	31	02	2	01		-	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Rp	2,948,195,984.00		2,899,362,426.00	48,833,558.00							
3	31	02	2	01	3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp	1,800,030,834.00	2.66	1,775,411,989.00	24,618,845.00	98.63		98.63		APBD		
3	31	02	2	01	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp	20,000,000.00	0.03	-	20,000,000.00	-		-		APBD		
3	31	02	2	01	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp	1,128,165,150.00	1.66	1,123,950,437.00	4,214,713.00	99.63		99.63		APBD		
8	3	31	03				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Rp	50,000,000.00		Rp 42,343,800.00	7,656,200.00							
3	31	03	2	01		-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	50,000,000.00		Rp 42,343,800.00	7,656,200.00							
3	31	03	2	01	01		Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp	50,000,000.00	0.07	42,343,800.00	7,656,200.00	84.69		84.69		APBD		
9	3	31	04				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	40,000,000.00		33,185,786.00	6,814,214.00							
3	31	04	2	01		-	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	40,000,000.00		33,185,786.00	6,814,214.00							
3	31	04	2	01	01		Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp	40,000,000.00	0.06	33,185,786.00	6,814,214.00	82.96		82.96		APBD		

10	3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	5,670,798,527.00		Rp	5,396,161,853.00	274,636,674.00								
	3	30	03	2	01		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	5,670,798,527.00		Rp	5,396,161,853.00	274,636,674.00								
	3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Sangatta Utara	Rp	5,670,798,527.00	8.37	Rp	5,396,161,853.00	274,636,674.00	95.16		90.66		APBD			
11	3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2,950,000,000.00		Rp	2,726,193,674.00	223,806,326.00								
	3	30	03	2	01		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2,950,000,000.00		Rp	2,726,193,674.00	223,806,326.00								
	3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Muara Wahau	Rp	2,950,000,000.00	4.35	Rp	2,726,193,674.00	223,806,326.00	92.41		92.31		APBD			
12	3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2,550,000,000.00		Rp	2,504,742,380.00	45,257,620.00								
	3	30	03	2	01		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2,550,000,000.00		Rp	2,504,742,380.00	45,257,620.00								
	3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Sangkulirang	Rp	2,550,000,000.00	3.76	Rp	2,504,742,380.00	45,257,620.00	98.23		98.17		APBD			
									67,785,806,417.00	100.00		63,823,638,953.00	3,962,167,464.00	94.15							

Sangatta, Desember 2024

Kepala Dinas

Nora Ramadani, S.H., M.H

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan kegiatan yang ada dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 dapat terbilang terlaksana dengan cukup baik, dana silpa cukup besar karena keterbatasan waktu pelaksanaan terlihat dari presentase keseluruhan serapan anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yaitu mencapai 95,14 %.

	3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	Pelaku Usaha	600,000,000.00						3.00	593,409,735.00	3.00	593,409,735.00	100.00	98.90	SR	SR	
	3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3	Pelaku Usaha	600,000,000.00						3.00	597,545,354.00	3.00	597,545,354.00	100.00	99.59	SR	SR	
	3	30	05	2	01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120	Pelaku Usaha	3,282,337,933.00		2	84,596,334.00	4	84,596,334.00	120.00	2,801,367,631.00	120.00	2,801,367,631.00	100.00	85.35	SR	SR	
5	3	30					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi			1,860,000,000.00		-	200.00	30,542,800.00	200.00	52,507,300.00	342.00	1,597,892,888.00	342.00	1,597,892,888.00				
	3	30	06	2	01		- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			1,860,000,000.00		-	50.90	30,542,800.00	2.82	52,507,300.00	86.00	1,597,892,888.00	86.00	1,597,892,888.00				
	3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	30	Unit	1,460,000,000.00		5	30,542,800.00	7	52,507,300.00	30.00	1,274,978,728.00	30.00	1,274,978,728.00	100.00	87.33	SR	SR	
	3	30	06	2	01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	425	Orang	400,000,000.00						475.00	322,914,160.00	475.00	322,914,160.00	111.76	80.73	SR	SR	
6	3	31	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			25,528,943,603.00	1,502,601,740.00	41.80	7,517,317,403.00	43.29	11,050,243,691.00	100.00	23,793,916,616.00	100.00	23,793,916,616.00					
	3	31	01	2	01		- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Ecaluasi Kinerja Perangkat Daerah			540,000,000.00		-	64.91	131,795,545.00	33.62	181,513,144.00	100.00	521,312,742.00	100.00	521,312,742.00				
	3	31	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	390,000,000.00		1	120,147,563.00	2	140,502,763.00	2.00	375,455,911.00	2.00	375,455,911.00	100.00	96.27	SR	SR	
	3	31	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	150,000,000.00		0.23	11,647,982.00	3	41,010,381.00	4.00	145,856,831.00	4.00	145,856,831.00	100.00	97.24	SR	SR	
	3	31	01	2	02		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah			15,885,179,667.00	1,502,601,740.00	48.86	6,456,597,080.00	59.31	9,421,363,602.00	100.00	14,229,531,843.00	100.00	14,229,531,843.00					
	3	31	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/ Bulan	11,596,053,521.00	3	1,183,323,956.00	8	5,362,411,576.00	11	7,670,427,613.00	14.00	10,291,038,520.00	14.00	10,291,038,520.00	100.00	88.75	SR	SR

3	31	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,134,926,146.00	1	319,277,784.00	6	996,194,460.00	9	1,408,035,532.00	12.00	2,856,232,283.00	100.00	2,856,232,283.00	100.00	91.11	SR	SR
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	2 Dokumen	447,861,866.00			0	79,647,361.00	1	167,497,804.00	2.00	409,714,044.00	100.00	409,714,044.00	100.00	91.48	SR	SR
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 Laporan	706,338,134.00			6	76,343,683.00	36	1,754,089,633.00	8.00	672,546,996.00	16.67	672,546,996.00	16.67	95.22	SR	SR
3	31	01	2	02	07	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		45,000,000.00		-	14.54	6,544,560.00	42.34	19,053,000.00	100.00	45,000,000.00		45,000,000.00				
3	31	01	2	03		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	45,000,000.00			1.00	6,544,560.00	2	19,053,000.00	3.00	45,000,000.00	75.00	45,000,000.00	75.00	100.00	SR	SR
						- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,566,289,679.00		-	100.00	636,600,000.00	27.36	702,199,062.00	100.00	2,565,606,299.00		2,565,606,299.00				
3	31	01	2	06		Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	889,532,662.00			3.00	400,000,000.00	3	465,599,662.00	4.00	889,532,662.00	50.00	889,532,662.00	50.00	99.97	SR	SR
3	31	01	2	06	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	147 Orang	1,676,757,017.00			22.00	236,600,000.00	22	236,600,000.00	147.00	1,676,298,637.00	100.00	1,676,298,637.00	100.00	99.97	SR	SR
3	31	01	2	06	09	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		1,324,550,046.00		-	64.50	161,867,025.00	18.44	344,200,152.00	100.00	1,324,032,961.00		1,324,032,961.00				
3	31	01	2	06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	6 Paket	29,965,736.00			5.00	26,515,714.00	6	29,965,469.00	6.00	29,965,469.00	100.00	29,965,469.00	100.00	100.00	SR	SR
3	31	01	2	06	05	Facilities Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	2 Laporan	62,000,000.00			1.00	11,000,000.00	1	11,000,000.00	2.00	61,941,337.00	100.00	61,941,337.00	100.00	99.91	SR	SR
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,142,384,310.00			1.00	121,627,696.00	1	193,234,683.00	1.00	1,142,211,086.00	100.00	1,142,211,086.00	100.00	99.97	SR	SR
3	31	01	2	06	09	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	90,000,000.00			1.00	2,723,615.00	1	10,000,000.00	2.00	89,915,149.00	100.00	89,915,149.00	100.00	99.91	SR	SR
						- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,137,060,000.00		-	-	-	-	100.00	1,133,019,489.00	100.00	1,133,019,489.00					
3	31	01	2	07		Pengadaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	116 Unit	1,037,080,000.00							116.00	1,033,848,415.00	100.00	1,033,848,415.00	100.00	99.69	SR	SR
3	31	01	2	07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000.00							1.00	99,171,074.00	100.00	99,171,074.00	100.00	99.17	SR	SR
						- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		637,938,321.00		-	30.26	42,853,583.00	14.50	92,495,951.00	100.00	621,656,321.00		621,656,321.00				
3	31	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	37,018,200.00			6.00	9,679,750.00	1	20,522,400.00	1.00	32,861,200.00	100.00	32,861,200.00	100.00	88.77	SR	SR
3	31	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600,920,321.00			-	33,173,833.00	1	71,973,551.00	1.00	588,796,321.00	100.00	588,796,321.00	100.00	97.98	SR	SR
3	31	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					-		1									
						- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,392,905,690.00		-	20.26	81,099,610.00	11.48	589,415,700.00	100.00	3,353,756,761.00		3,353,756,761.00				

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 80.073.013.577,- dan mengalami perubahan anggaran tambahan sebesar Rp. 38.166.734.014,- menjadi Rp. 118.239.747.591,- terdiri dari :

- 9 Program, 15 kegiatan, dan 55 Sub Kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- UPT Pasar Induk kinerja 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan;
- UPT Pasar Muara Wahau 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan;
- UPT Pasar Sangkulirang 1 Program, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan;

Dengan Total 12 Program, 18 Kegiatan, 58 Sub Kegiatan. Diharapkan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah dalam RKPD tahun 2023 merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode terakhir dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 yang harus diwujudkan dan didukung Perangkat Daerah.

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: (a) aspek kesejahteraan masyarakat, (b) aspek pelayanan umum, dan (c) aspek daya saing daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kabupaten Kutai Timur melahirkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 tahun 2010 Tentang Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

a. Tugas Pokok :

Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur.

b. Fungsi :

1. Pelaksana kebijaksanaan pembinaan usaha industri dan perdagangan dalam rangka pembangunan industri dan perdagangan yang disesuaikan dengan perkembangan iklim usaha daerah yang bersangkutan serta perijinan.
2. Pelaksanaan kegiatan program di sektor industri kecil serta perdagangan dalam dan luar negeri.
3. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan di daerah kabupaten kutai timur.
4. Pengawasan mutu dan pemantauan penetapan standar sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.

5. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerj Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian dan;
 - b. Subag Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Bidang yaitu :
 - a. Bidang Industri
 - b. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - d. Bidang Kemetrolagian
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur berdasarkan indikator kinerja SKPD Yang Mengacu
Pada RKPD Kabupaten Kutai Timur.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur antara lain :

1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang mengalami perubahan sehingga perlu adanya revaluasi perencanaan kembali program dan kegiatan di OPD.
2. Selalu adanya peraturan/regulasi baru terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar OPD dapat segera mengaplikasikannya.
3. Masih kurangnya pejabat struktural yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana. Kondisi ini berimplikasi terhadap produk yang dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta output koordinasi yang belum optimal.

Disamping isu – isu yang disampaikan diatas juga ada beberapa isu – isu strategis aktual yang dihadapi oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Isu – isu strategis meliputi aspek internal (Intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan, kondisi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu – isu strategis aktual yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dapat di kelompokkan dalam 5 (Lima) bagian berdasarkan pada permasalahan lokal yang dihadapi oleh bidang teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

- a. Banyak produk IKM yang belum tersertifikasi;
- b. Penyediaan sarpras pasar di wilayah kecamatan dan desa kurang memadai;
- c. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan BBM belum dilakukan secara kontinu;
- d. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD; dan
- e. Pemasaran produk koperasi dan UKM belum memanfaatkan *e-commerce*

Isu – isu strategis aktual tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan misi – misi yang dilaksanakan oleh disperindag dalam rangka pembangunan wilayah agroindustri yang kuat, hal ini harus didukung oleh kemandirian dan keterkaitan antara bisnis/industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat. Keterkaitan antar bisnis meliputi keterkaitan ke depan (forward linkage) yaitu membentuk rantai pasok (supply chain) pada sektor usaha lainnya berupa dukungan bahan baku setengah jadi/jadi, mesin/peralatan, pemasaran dan lain sebagainya.

Keterkaitan antar bisnis kebelakang (backward linkage) yaitu meliputi rantai pasok yang berasal dari sector usaha lain seperti sumber bahan baku, produk setengah jadi/jadi, tenaga kerja, mesin/peralatan dan lain sebagainya. Keterkaitan tersebut harus bersipat sinambung (sustainable) agar dapat menjamin kemandirian IKM/bisnis itu sendiri.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan, penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi Renstra diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Arah Kebijakan industri 2005-2025 seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
2. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional sedrta untuk memperkuat basis produksi secara nasional;
3. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan

pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa.

4. Struktur dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar;
5. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar;
6. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui :
 - a. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui divesifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir)
 - b. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multi nasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.

Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang antara lain sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi) sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang beribawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh

efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian (RPJMN) 2020–2024. mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM**
Pembangunan SDM dilakukan dengan strategi peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter sehingga tercipta SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Strategi dalam pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya).
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Menyederhanakan birokrasi dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dilaksanakan dengan strategi penyederhanaan prosedur segala bentuk perizinan, penyelenggaraan e-

government, dan reformasi birokrasi pelayanan public untuk kegiatan ekspor, impor, kepabeanan, dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi dalam transformasi ekonomi adalah Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kepastian Hukum : Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. Logistik nasional : Pengembangan dan Penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. Sistem Informasi : Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade Sistem (CATS)* di *dry port* Cikarang. KEK : Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema *Publik-Private Partnership* sebelum 2012. Kebijakan ketenagakerjaan : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Program prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian :

1. Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
2. Meningkatkan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan Internasional.
3. Memastikan dukungan atas program pengembangan energy terbarukan antara lain energi-bio melalui penyediaan bahan baku.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan.

5. Meningkatkan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
6. Mengembangkan model *link and match* dengan sektor pendidikan dalam upaya mencetak wiraswasta baru.
7. Peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha.
8. Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional.

Visi : Kementrian Perdagangan yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- Misi :**
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Mengacu pada kedua tema pembangunan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

“Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur juga harus selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta tema pembangunan Kutai Timur tahun 2025.

Terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Agenda Pembangunan tersebut selanjutnya menjadi panduan dalam menyusun Prioritas Pembangunan Tahunan dalam RKPD sebagai berikut.

1. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,
2. Peningkatan daya saing daerah
3. Pembangunan berkelanjutan

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Perda RPJMD Kutai timur Tahun 2021-2026, Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- a. Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas
- b. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur

b. Sasaran

- a. Jumlah Pasar
- b. Jumlah Rekomendasi Izin yng diterbitkan
- c. Jumlah Operasi Pasar
- d. Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor
- e. Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi
- f. Pertumbuhan Jumlah IKM
- g. Jumlah Industri yang melaksanakan verifikasi

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 terdiri dari 10 Program dan 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

UPT. Pasar Induk terdiri dari 2 Program, 6 Kegiatan, 9 Sub Kegiatan. UPT. Pasar Muara Wahau terdiri dari 1 Program, 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan. Dan, UPT. Pasar Sangkulirang terdiri dari 1 Program, 4 Kegiatan, 8 Sub Kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			93,326,879,349.00							116,668,599,186.25	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			93,326,879,349.00							116,668,599,186.25	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			59,472,769,277.00							74,340,949,096.25	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Peningkatan Aktifitas Perdagangan Dalam Negeri	1 Laporan	71,943,000.00						1 1 Rekom	89,928,750.00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Fasilitas Izin Yang Diterbitkan	Laporan	0.00			-	-	Pelaku Usaha	-	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKA	1 Dokumen	71,943,000.00			-	-	Pelaku Usaha	2 Dokumen	89,928,750.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA											
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	100 Dokumen	71,943,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		89,928,750.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar	16 Unit	49,517,549,000.00						17 100% 17 Pasar	61,896,936,250.00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Persentase Pasar yang Terfasilitasi	38 Persen	49,517,549,000.00			-	-	Pelaku Usaha	86%	61,896,936,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan											
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	49,517,549,000.00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Teluk Pandan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		61,896,936,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Operasi Pasar	4 Kali	9,046,629,414.00					4 Operasi Pasar	11,307,036,767.60	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Kab/Kota	1 Laporan	212,875,700.00			-	-	Pelaku Usaha	266,094,625.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20 Laporan	79,275,700.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	99,094,625.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	200 Laporan	133,600,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	167,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang di Tingkat Pasar	1 Laporan	8,632,753,714.00			-	-	1 Laporan	11,040,942,142.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	158,240,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		197,800,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	8,674,513,714.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10,843,142,142.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	6 Pelaku Usaha	354,638,031.00					6 IKM	443,172,538.75	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	354,638,031.00			-	-	Pelaku Usaha	443,172,538.75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	257,694,561.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	322,118,201.25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	50,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	62,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	10,858,500.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	13,573,125.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor										
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	35,984,970.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha	44,981,212.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat UTP yang Terstandarisasi	400 Layanan	488,886,500.00						400	586,108,125.00	
											400 Alat		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1 Laporan	488,886,500.00		-	-	Pelaku Usaha	1 Laporan		586,108,125.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											
			Jumlah Alat Ukur, Alat Taker, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 unit	211,691,500.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		284,614,375.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500 Orang	257,195,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		321,493,750.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal											
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	20 Unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri	100%	14,213,332.00							17,766,665.00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	14,213,332.00							17,766,665.00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten / Kota											
			Terlaksananya Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	14,213,332.00							17,766,665.00	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten / Kota											
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retai, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	2 UMKM	0.00							0.00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			30,387,346,122.00							37,984,182,662.50	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap Apratur Disperindag Kab. Kutim	19 Layanan	27,458,726,996.00						100%	34,323,408,745.00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	196,455,000.00		-	-	ASN	1 Laporan		245,568,750.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	125,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	96,455,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	120,668,750.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	22,982,341,016.00			-	-	-	1 Laporan 28,727,926,270.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	22,679,183,235.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28,348,979,043.75 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Orang/bulan								
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	230,619,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	288,273,750.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyimpulan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 Laporan	72,538,781.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	90,673,476.25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	0.00			-	-	ASN	1 Laporan 0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	0.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	1 Laporan	251,200,000.00			-	-	-	1 Laporan	314,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dines beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	251,200,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		314,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06	Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	726,480,882.00			-	-	ASN	1 Laporan	908,101,102.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0002	Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0004	Penyedlaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0005	Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2,326,990.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2,908,737.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	107,750,040.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		134,687,650.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	575,517,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		719,396,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	40,886,852.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		51,108,665.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0.00			-	-	ASN	5 Unit	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08	Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2,249,593,854.00			-	-	ASN	1 Jasa	2,811,992,317.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0001	Penyedlaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		48,750,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,210,593,654.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2,763,242,317.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,052,666,244.00			-	-	-	1 Laporan	1,315,820,305.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	720,706,244.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900,882,805.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	331,950,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		414,937,500.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara / direhabilitasi	1 unit	0.00							0.00	
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM	1620 IKM	2,878,619,126.00						1.860 IKM 1.860 IKM	3,598,273,907.50	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,878,619,126.00			-	-	Pelaku Usaha	1 Dokumen	3,598,273,907.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	774,877,626.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		968,567,032.50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		62,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2,053,741,500.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		2,667,176,875.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	0.00							0.00	

3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21,102,600.00							26,378,250.00	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket									
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			42,075,000.00							52,593,750.00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan									
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	931,920,000.00							1,164,900,000.00	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75,000,000.00							93,750,000.00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan									
3.31.01.2.08.0008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			856,920,000.00							1,071,150,000.00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan									
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	-							-	
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-							0.00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit									
J U M L A H				93,326,679,349.00							116,668,699,186.25	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja OPD Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Sangatta, Agustus 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur,



Nora Ramadani, S.H., M.H
NIP. 19720330 200502 1 001